

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  
DALAM RANGKA PENINGKATAN INVESTASI  
DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU**

Wildhan Salim Lessy

NPP. 32.1012

*Asdaf Kabupaten Buru, Provinsi Maluku*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: [32.1012@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.1012@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr. Frans Dione, S.IP., M.Si.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Investment is important because it supports the economy of a region. The Buru Regency Government has implemented the Investment Climate Development Program, but the data shows that there is instability as seen from the very significant changes in the value of investment realization, both increasing and decreasing. **Purpose:** This research aims to know, understand, analyze, and describe the Effectiveness of the Investment Climate Development Program and the efforts of the Local Government in order to improve the Investment Climate in Buru Regency, Maluku Province. **Method:** Using a descriptive qualitative approach with data collection techniques through semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation. Determination of informants was done through purposive sampling and snowball sampling techniques. The informants in this study totaled 16 people consisting of employees at the Investment and One-Stop Integrated Service Office of Buru Regency starting from the Head of the Office to the Head of the Investment Climate Planning and Development Section. In addition, the researcher also interviewed the Head of the Regional Economy and Production Section of the Regional Secretariat of Buru Regency, investors, academics, and the community. The researcher chose these informants because this program is implemented by the Investment and One-Stop Integrated Service Office, and the researcher also needed representation of answers from parties outside the government, including investors, the community, and academics. **Result:** The results of the study based on the theory of effectiveness according to Riant Nugroho (2014) show that this program is less effective. In the dimensions of the right policy and the right environment, this program is effective, but in the dimensions of the right implementer, the right target, and the right process it is still not effective because of obstacles such as budget constraints, lack of investment support infrastructure, lack of information and promotion of regional investment potential, lack of adequate human resources, and many people who do not know and understand this program. **Conclusion:** Efforts made by the local government are to provide guidance and registration for Micro and Small Enterprises through DUDESO Innovation (UMKM Depot and Bupolo Community Crafts), participate in exhibition activities such as the Inacraft Exhibition, and collaborate with other parties both government and private. The suggestions given are that the One-Stop Investment and Integrated Service Office should be more active in finding alternative sources of financing other than the available budget allocation, should be more intensive in conducting socialization, should submit requests for additional budgets, and should prioritize the available budget allocation for incentive/ease activities. **Keywords:** Effectiveness, Program, Investment Climate Development, Investment

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Investasi merupakan hal yang penting karena merupakan penopang perekonomian suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Buru telah melaksanakan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, namun data menunjukkan adanya ketidakstabilan yang dilihat dari perubahan nilai realisasi investasi yang sangat signifikan baik meningkat maupun menurun. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menganalisa, dan mendeskripsikan Efektivitas Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan upaya Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. **Metode:** Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yang terdiri dari para pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru mulai dari Kepala Dinas hingga Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Selain itu, peneliti juga mewawancarai Kepala Sub Bagian Ekonomi dan Produksi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buru, investor, akademisi, dan masyarakat. Peneliti memilih para informan tersebut karena program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, selain itu peneliti juga membutuhkan keterwakilan jawaban dari pihak-pihak diluar pemerintah baik investor, masyarakat, maupun akademisi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian berdasarkan teori efektivitas menurut Riant Nugroho (2014) menunjukkan bahwa program ini kurang efektif. Pada dimensi tepat kebijakan dan tepat lingkungan program ini sudah efektif, namun pada dimensi tepat pelaksana, tepat target, dan tepat proses masih belum efektif karena adanya hambatan-hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur pendukung investasi, minimnya informasi dan promosi potensi investasi daerah, minimnya SDM yang memadai, serta banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami program ini. **Kesimpulan:** Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Inovasi DUDESO (Depot UMKM dan Kerajinan Masyarakat Bupolo), mengikuti kegiatan-kegiatan pameran seperti Pameran Inacraft, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta. Saran yang diberikan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebaiknya lebih aktif dalam mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan selain dari alokasi anggaran yang tersedia, sebaiknya lebih gencar dalam melakukan sosialisasi, sebaiknya mengajukan permohonan penambahan anggaran, dan sebaiknya memprioritaskan alokasi anggaran yang tersedia untuk kegiatan pemberian insentif/kemudahan.

**Kata kunci:** Efektivitas, Program, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Investasi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

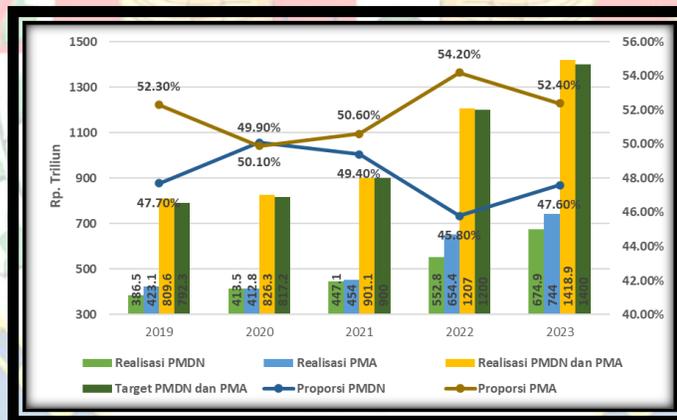
Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang sangat besar dan tidak hanya terfokus pada sumber daya yang terdapat di darat, tetapi juga kekayaan alam lautnya (Putri, 2022). Sebagai negara berkembang, Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah ini terus berupaya menarik investasi untuk mempercepat pembangunan ekonominya (Sugiarto, 2019). Investasi di dalam suatu wilayah memberikan peran yang positif untuk pembangunan, artinya investasi yang berkembang di dalam suatu daerah akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap sektor lainnya di dalam suatu daerah (Putra & Nababan, 2019). Investasi juga merupakan instrumen penting yang dapat menjalankan roda perekonomian suatu negara sekaligus turut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Kemenko Bidang

Perekonomian, 2022). Investasi juga menjadi salah satu alternatif dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19 (Dai et al., 2023), selain melalui kebijakan ekonomi fiskal dan moneter (Wang et al., 2023) serta melalui kebijakan makro prudential (Padhan & Prabheesh, 2021).

Peningkatan kegiatan investasi mampu mendorong terciptanya aktivitas ekonomi dan mendukung pembukaan berbagai bidang usaha, yang berdampak pada penurunan jumlah pengangguran karena pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan peluang bagi masyarakat untuk bekerja, hal ini mampu untuk meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat menjadi bertambah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan perekonomian (Sulistiawati, 2012). Kegiatan investasi baik yang dilakukan oleh pihak asing (PMA) maupun domestik (PMDN) dapat menjadi penopang penting bagi peningkatan perekonomian nasional (BKPM, 2022) serta masing-masing memiliki dampak yang positif di dalam suatu daerah seperti tumbuhnya skala ekonomi di dalam suatu wilayah, penyerapan tenaga kerja, hingga penyerapan produk dari sektor lainnya di tempat investasi tersebut terealisasi (Martua, 2022).

Oleh sebab itu, harus ada upaya-upaya yang terarah untuk mengembangkan nilai realisasi investasi baik realisasi investasi asing ataupun realisasi investasi dalam negeri (Sugiarto, 2019). Pengambilan langkah-langkah yang tepat dimaksudkan untuk mengoptimalkan investasi yang baik sehingga investor juga akan tertarik dan mau untuk menanamkan modalnya (Sugiarto, 2019).

Berikut adalah data terkait perkembangan dan proporsi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 seperti yang terdapat pada gambar 1.1 dibawah ini.



Sumber: Diolah oleh penulis dari Kementerian Investasi/BKPM, 2024

**Gambar 1.1 Perkembangan dan Proporsi PMDN-PMA Indonesia Tahun 2019-2023**

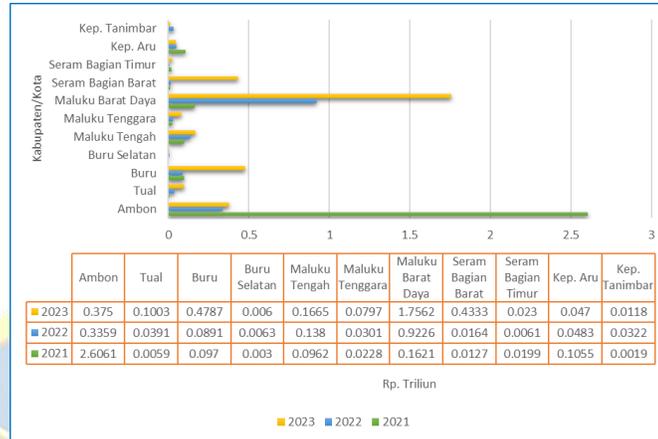
Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan dan proporsi PMDN dan PMA dalam kurun waktu 5 tahun. Berdasarkan data tersebut, realisasi PMDN dari tahun 2019 sampai 2023 terus mengalami peningkatan dengan nilai di tahun 2023 sebesar Rp. 674,9 triliun. Secara umum jika digabungkan maka dapat dilihat bahwa nilai realisasi PMDN dan PMA terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir dari Rp. 809,6 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp. 1418,9 triliun di tahun 2023. Proporsi PMDN dalam kurun waktu 5 tahun selalu berada dibawah proporsi PMA kecuali pada tahun 2020 dimana proporsi PMDN sebesar 50,10% yaitu lebih besar dibandingkan proporsi PMA sebesar 49,90%. Namun, tentunya nilai realisasi investasi di setiap daerah akan selalu bebrbeda. Berikut akan disajikan tujuh provinsi dengan realisasi investasi terendah pada tahun 2020 hingga 2023 seperti dalam tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1 Tujuh Provinsi dengan Realisasi Investasi Terendah di Indonesia (Triliun/Tahun)**

| Tahun | Provinsi                | Realisasi Investasi | Keterangan   |
|-------|-------------------------|---------------------|--|
| 2020  | 1. Sulawesi Barat       | 0,35 triliun        | Maluku menempati peringkat kelima terendah dari 34 provinsi  |
|       | 2. Gorontalo            | 1,66 triliun        |  |
|       | 3. Papua Barat          | 2,08 triliun        |  |
|       | 4. D.I Yogyakarta       | 2,82 triliun        |  |
|       | 5. Maluku               | 3,02 triliun        |  |
|       | 6. Kalimantan Utara     | 3,22 triliun        |  |
|       | 7. Jambi                | 3,9 triliun         |  |
| 2021  | 1. Sulawesi Barat       | 0,48 triliun        | Maluku menempati peringkat kelima terendah dari 34 provinsi  |
|       | 2. Papua Barat          | 1,11 triliun        |  |
|       | 3. Gorontalo            | 2,14 triliun        |  |
|       | 4. D.I Yogyakarta       | 3,08 triliun        |  |
|       | 5. Maluku               | 3,13 triliun        |  |
|       | 6. Kep. Bangka Belitung | 4,33 triliun        |  |
|       | 7. Nusa Tenggara Timur  | 4,89 triliun        |  |
| 2022  | 1. Maluku               | 1,66 triliun        | Maluku menempati peringkat pertama terendah dari 34 provinsi |
|       | 2. Sulawesi Barat       | 1,71 triliun        |  |
|       | 3. Gorontalo            | 2,59 triliun        |  |
|       | 4. Papua Barat          | 3,26 triliun        |  |
|       | 5. D.I Yogyakarta       | 3,9 triliun         |  |
|       | 6. Sumatera Barat       | 3,95 triliun        |  |
|       | 7. Nusa Tenggara Timur  | 4,5 triliun         |  |
| 2023  | 1. Papua Pegunungan     | 0,12 triliun        | Maluku menempati peringkat ketujuh terendah dari 38 provinsi |
|       | 2. Papua                | 1,3 triliun         |  |
|       | 3. Papua Selatan        | 1,43 triliun        |  |
|       | 4. Papua Barat          | 1,6 triliun         |  |
|       | 5. Sulawesi Barat       | 2,3 triliun         |  |
|       | 6. Papua Barat Daya     | 3 triliun           |  |
|       | 7. Maluku               | 3,46 triliun        |  |

Sumber: Diolah oleh penulis dari Kementerian Investasi/BKPM, 2024

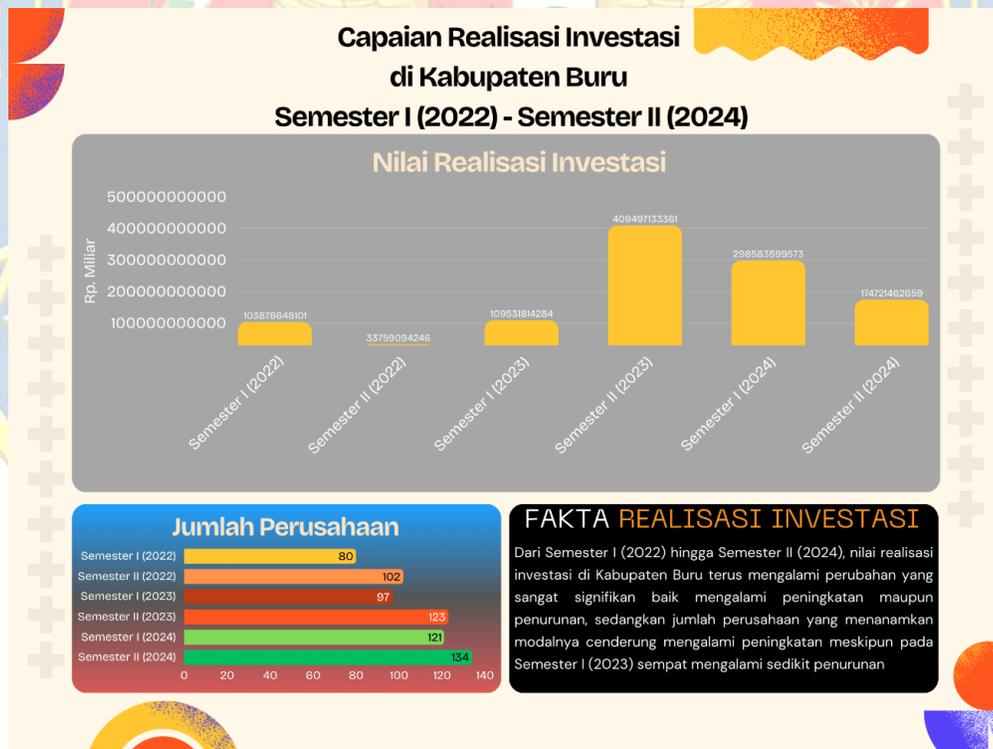
Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Provinsi Maluku pada tahun 2020 hingga 2023 selalu termasuk kedalam tujuh provinsi dengan realisasi investasi terendah di Indonesia, bahkan pada tahun 2022 Provinsi Maluku menempati posisi pertama provinsi dengan realisasi investasi terendah yaitu hanya senilai Rp. 1,66 triliun. Adapun data realisasi investasi menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku dari tahun 2021-2023 dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini.



Sumber: Diolah oleh penulis dari BPS Provinsi Maluku, 2024

**Gambar 1.2 Realisasi Investasi Penanaman Modal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021-2023 (Triliun/Tahun)**

Gambar 1.3 yang menunjukkan bahwa dari tahun 2021 hingga 2023 nilai realisasi investasi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Maluku cenderung bersifat fluktuatif. Realisasi investasi tertinggi terdapat di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Barat Daya, sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada tahun 2021 realisasi investasi di Kabupaten Buru berada pada nilai Rp. 0,0970 triliun dan naik secara signifikan hingga mencapai Rp. 0,4787 triliun pada tahun 2023. Data terkait capaian realisasi investasi di Kabupaten Buru seperti yang terdapat pada gambar 1.3 berikut.



Sumber: Diolah oleh penulis dari LKPM DPMPSTP Kabupaten Buru, 2025

**Gambar 1.3 Infografis Realisasi Investasi di Kabupaten Buru Semester I (2022) – Semester II (2024)**

Gambar 1.3 menunjukkan nilai realisasi investasi dan jumlah perusahaan di Kabupaten Buru dari semester I (2022) hingga semester II (2024). Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai realisasi investasi dan jumlah perusahaan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Buru terus berubah-ubah. Pada semester I (2022) realisasi investasi senilai Rp. 103.878.648.101 dengan jumlah perusahaan sebanyak 80 namun pada semester II (2022) jumlah tersebut turun cukup signifikan bahkan hingga mencapai Rp. 33.759.094.246 walaupun jumlah Perusahaan mengalami peningkatan menjadi 102 perusahaan.

Untuk mengatasi fenomena perubahan nilai realisasi investasi yang cenderung naik dan turun secara signifikan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka pemerintah daerah Kabupaten Buru melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru melaksanakan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam mengoptimalkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Namun, jika dilihat dari data diatas menunjukkan bahwa nilai realisasi investasi di Kabupaten Buru belum stabil. Hal ini menandakan bahwa program ini belum berjalan dengan efektif.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Efektivitas Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Buru diantaranya yaitu kurangnya anggaran yang menjadi kendala utama sehingga membuat investor kurang berminat untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Buru, karena jika tidak ada anggaran bagaimana kegiatan bisa berjalan, bahkan sejak tahun 2022 pada bagian penanaman modal tidak kebagian anggaran dan untuk tahun 2025 ini ada alokasi anggaran sebesar 30 juta yang akan difokuskan untuk pembuatan peraturan daerah terkait pemberian insentif bagi para investor. Padahal seharusnya anggaran sudah disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan melalui kegiatan yang sudah direncanakan dalam suatu periode (Fuad et al., 2020). Apalagi mengingat suatu kebijakan atau program akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh perencanaan anggaran yang matang dan terarah (Yanto et al., 2022).

Minimnya informasi dan promosi potensi investasi daerah yang tersedia bagi calon investor juga menjadi suatu permasalahan karena kurangnya informasi mengenai potensi investasi yang ada dapat membuat investor tidak menyadari peluang yang ada, sehingga mereka lebih memilih untuk berinvestasi di daerah lain yang lebih terkenal (Yanto, 2024). Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai akan menyulitkan distribusi barang dan aksesibilitas ke lokasi investasi, sehingga investor mungkin akan memilih untuk berinvestasi di daerah lain yang memiliki infrastruktur yang lebih baik (Yanto, 2024).

Disamping itu, kurangnya sumber daya manusia yang tersedia menjadi suatu penghambat. SDM pelayanan sebagai kunci keberhasilan kinerja organisasi pelayanan publik harus mendapatkan perhatian utama dalam perbaikan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki merupakan salah satu penentu keberhasilan pelayanan publik (Anjani et al., 2019).

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar acuan dan menjadi perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta untuk menghindari adanya plagiasi atau kesamaan dengan penelitian orang lain. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan pokok persoalan yang diteliti sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi

peneliti dalam melakukan penelitian. Salah satu penelitian yang dijadikan acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh (Adnyani & Azansyah, 2024) dengan judul *The Influence of Investment on Economic Growth in Sumbagsel*. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa investasi memberikan dampak positif dan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Lubis et al., 2023) dengan judul *The Implementation of One-Stop Integrated Services in Attracting Investment to North Sumatera Province*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara berupaya menciptakan citra positif dengan cara menghilangkan citra negatif tentang buruknya pelayanan perizinan. Selain menciptakan citra positif, DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara berupaya melaksanakan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang belum tuntas, dalam arti masih terdapat kesenjangan kewenangan antar instansi sehingga belum sepenuhnya memenuhi harapan dan kepuasan pengguna pelayanan perizinan dan disamping itu, birokrasi yang rumit sehingga menyulitkan investor dalam mengurus perizinan usaha.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Saragi & Angelia, 2023) dengan judul *Strategy of the Investment and Licensing Services in Increasing Investment in North Sumatra Province During the Covid-19 Pandemic*. Hasil penelitian menunjukkan strategi atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara dalam upaya peningkatan investasi di Sumatera Utara adalah dengan melaksanakan *North Sumatra Investment (NSI)*, meningkatkan kualitas investasi dengan melakukan inovasi pelayanan publik, dan meningkatkan efektivitas kesempatan investasi.

Penelitian dengan fokus serupa juga dilakukan oleh (Zulkifly, 2023) yang berjudul *Collaborative Governance in Investment Programs in Makassar City*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dalam program penanaman modal di Kota Makassar berjalan dengan baik, terlihat dari adanya dialog tatap muka yang rutin, serta adanya rasa saling percaya yang terbangun melalui pemberian informasi dan evaluasi layanan. Komitmen bersama terwujud dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun, masih terdapat SDM aparatur yang belum mengikuti pelatihan pengelolaan penanaman modal, sehingga menghambat pelaksanaan program secara optimal. Sementara itu, telah terbangun kesepahaman bersama melalui musyawarah bersama sebagai bentuk pembahasan kendala. Hasil dari program penanaman modal dapat dilihat dari adanya peningkatan penanaman modal dalam dan luar negeri setiap tahunnya.

Selain itu, penelitian dengan judul *Perencanaan Strategis dalam Meningkatkan Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu* oleh (Bakri et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 indikator yaitu penetapan visi misi dan tujuan organisasi, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, identifikasi isu-isu strategis, dan mengembangkan strategi. Dari kelima indikator tersebut 4 diantaranya berjalan dengan baik dan 1 kurang baik. Dengan menggunakan analisis SWOT dapat kita ketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan memiliki faktor kekuatan dan ancaman yang lebih tinggi daripada faktor kelemahan dan peluang. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan investasi di Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan faktor kekuatan untuk mengatasi ancaman.

Secara umum, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa telah dilakukannya berbagai bentuk pelaksanaan kebijakan atau strategi untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka peningkatan investasi, mengingat investasi merupakan hal yang krusial karena pengaruhnya pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat.

#### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini membahas secara spesifik mengenai Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan investasi, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Adnyani & Azansyah, 2024) membahas mengenai pengaruh investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi; penelitian yang dilakukan oleh (Lubis et al., 2023) mengulas tentang pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu secara umum dalam menarik minat investor; penelitian yang dilakukan oleh (Saragi & Angelia, 2023) mengkaji terkait bagaimana cara meningkatkan investasi selama pandemi Covid-19; penelitian yang dilakukan oleh (Zulkifly, 2023) lebih menekankan pada kolaborasi pemerintahan dalam melaksanakan program investasi; dan penelitian yang dilakukan oleh (Bakri et al., 2022) yang menitikberatkan pada perencanaan bukan pada penilaian dari pelaksanaan program.

Ditinjau dari lokasi penelitian, tidak ada satupun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan lokasi dengan penelitian yang akan dilakukan. Lokasi penelitian terdahulu berada di daerah Sumatera Bagian Selatan (Adnyani & Azansyah, 2024); Provinsi Sumatera Utara (Lubis et al., 2023; Saragi & Angelia, 2023); Kota Makassar (Zulkifly, 2023); dan Provinsi Sulawesi Selatan (Bakri et al., 2022).

Berdasarkan teori yang digunakan, tidak ada satupun penelitian terdahulu yang menggunakan teori efektivitas menurut (Nugroho, 2014) sebagai teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian terdahulu teori yang digunakan adalah teori implementasi menurut George Edward III (Lubis et al., 2023); teori strategi menurut Hari Suminto (Saragi & Angelia, 2023); teori *collaborative governance* menurut Ansel dan Gash (Zulkifly, 2023); teori penyusunan perencanaan strategis menurut Bryson (Bakri et al., 2022); dan *Random Effect Model (REM)* menurut Breusch-Pagan (Adnyani & Azansyah, 2024).

#### 1.5. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, menganalisa, dan mendeskripsikan Efektivitas Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Buru Provinsi Maluku

## II. METODE

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Nugrahyu et al., 2022). Pendekatan penelitian merupakan tahapan yang krusial yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti sebelum melakukan penelitiannya. Pendekatan penelitian adalah prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah dari asumsi umum hingga metode pengumpulan data yang terperinci, analisis, dan interpretasi (Creswell & Creswell, 2023). Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata atau lisan seseorang dan perilaku yang dapat diamati (Taylor et al., 2016). Sedangkan menurut (Anjani et al., 2019), pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara komprehensif atau menyeluruh dan mendalam mengenai suatu kebijakan. Penelitian deskriptif umumnya digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti dokumen, catatan lapangan, foto, video, wawancara, dan catatan lainnya (Moleong, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah penelitian yang dapat dijawab oleh peneliti dengan mengumpulkan informasi berupa data maupun realita. Berpedoman pada penelitian deskriptif kualitatif, penulis dapat mengetahui, memahami, menganalisa dan mendeskripsikan Efektivitas Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Buru Provinsi Maluku serta upaya-upaya yang telah diterapkan dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi di Kabupaten Buru dengan melakukan

kajian mendalam yang terfokus dalam Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Buru Provinsi Maluku

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan guna mengumpulkan data. Upaya penelitian kualitatif dalam prosesnya melibatkan usaha seperti pengajuan pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data dari partisipan serta menafsirkan makna data (Dewi et al., 2025). Menurut (Creswell & Creswell, 2023) dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah manusia yaitu peneliti yang mengumpulkan data melalui pertanyaan, mendengarkan, meminta serta mengambil data. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sebagai instrumen utama dengan dibantu oleh alat-alat pengumpul data yang meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan lapangan, serta media tulis dan alat elektronik. Menurut (Sugiyono, 2013) berdasarkan sumbernya data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam melakukan penelitian dapat diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara semi terstruktur, observasi non partisipan, serta dokumentasi langsung dengan pihak yang memiliki keterkaitan di lingkungan pemerintah daerah khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui dokumen daerah, laporan serta melalui website dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Kabupaten, artikel, buku referensi, serta jurnal yang berkaitan dengan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Investasi.

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan melalui 2 (dua) teknik utama, yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2013). Pada teknik *purposive sampling*, pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria spesifik yang telah ditentukan sebelumnya, contohnya dengan memilih informan yang dinilai memiliki pengetahuan yang mendalam terkait topik penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, *snowball sampling* merupakan metode pengumpulan data yang dimulai dari jumlah responden yang terbatas, kemudian secara bertahap berkembang menjadi lebih banyak seiring dengan berjalannya penelitian. Total informan yang dipilih berjumlah 16 orang yang terdiri dari para pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Selain itu, peneliti juga mewawancarai Kepala Sub Bagian Ekonomi dan Produksi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buru, investor, akademisi, dan masyarakat.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model interaktif menurut (Miles et al., 2014) yang terdiri dari kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*). Adapun analisisnya menggunakan teori efektivitas yang digagas oleh (Nugroho, 2014) yang menjelaskan bahwa untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu kebijakan atau program dapat dilihat dari “lima tepat”, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menggambarkan secara komprehensif tentang bagaimana Efektivitas Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan apa upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Efektivitas berkenaan dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan, atau pencapaian tujuan dari dilaksanakannya tindakan, yang berhubungan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan (Fatmariyanti & Fauzi, 2023). Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teori efektivitas menurut (Nugroho, 2014) terhadap berbagai indikator efektivitas

implementasi kebijakan karena dinilai lebih tepat dan lebih dapat mengukur Efektivitas Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam Rangka Peningkatan Investasi di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Menurut (Nugroho, 2014) dalam bukunya “*Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*” menjelaskan bahwa untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu kebijakan atau program dapat dilihat dari “lima tepat”, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

### 3.1. Tepat Kebijakan

Dimensi tepat kebijakan, dinilai dari sejauh mana kebijakan yang dibuat memuat hal-hal yang dapat memecahkan masalah, apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai karakter masalah, dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai karakter kebijakan (Nugroho, 2014).

#### 1. Kesesuaian antara Pelaksana Kebijakan dengan Tujuan Kebijakan

Efektivitas kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksana kebijakan dengan desain atau tujuan serta sasaran kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mampu menghasilkan dampak positif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Nugroho, 2014).

Untuk melihat apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan tujuan kebijakan, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Ekonomi dan Produksi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buru, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru serta Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui salah satu tujuan pelaksanaan program ini adalah untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di Kabupaten Buru. Namun, hasil dari pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal telah menunjukkan hasil yang bervariasi, baik mengalami peningkatan maupun penurunan, dan tentunya terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian yaitu keterbatasan anggaran yang menyebabkan program ini belum berjalan dengan baik karena terkait dengan kegiatan pemberian insentif belum dapat dilakukan, bahkan hingga saat ini program ini belum memiliki payung hukum namun dengan terlaksananya pembuatan peta potensi investasi telah mampu memberikan informasi kepada para calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Buru sehingga dapat meningkatkan realisasi investasi.

Hasil wawancara diatas juga didukung oleh data perkembangan nilai realisasi investasi di Kabupaten Buru dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1 Capaian Realisasi Investasi Kabupaten Buru Tahun 2022 - 2024**

| Semester/<br>Tahun | Nilai Realisasi Investasi<br>(Milliar) | Jumlah Perusahaan |
|--------------------|--|-------------------|
| 2022               | 137.637.742.347                        | 182               |
| 2023               | 519.028.947.645                        | 220               |
| 2024               | 473.305.062.232                        | 255               |

Sumber: Diolah oleh penulis dari LKPM DPMPSTSP Kabupaten Buru, 2025

## **2. Pengaruh Kebijakan terhadap Permasalahan**

Menurut (Nugroho, 2014) untuk menguji seberapa besar pengaruh dari program ini, maka perlu untuk mengetahui terlebih dahulu hubungan antar program dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut perlu untuk dilakukan observasi. Namun, perlu disadari bahwa perubahan dan kondisi yang sebenarnya terjadi merupakan suatu hal yang sering diabaikan, tetapi mempunyai pengaruh yang besar.

Untuk mengetahui pengaruh dari sebelum dan sesudah adanya program ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Ekonomi dan Produksi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buru, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru serta Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa sebelum adanya program ini, minat investor dengan nilai investasi yang stagnan dan sebagian besar didominasi oleh usaha skala kecil dan menengah dengan modal terbatas. Namun, dengan adanya program ini terdapat beberapa investor skala menengah-besar, tersedianya database potensi investasi yang dapat diakses dengan mudah melalui website, dan adanya peningkatan promosi investasi. Selain itu, sebelumnya masih terdapat banyaknya konflik lahan dan tumpang tindih perizinan serta keterbatasan dalam pengelolaan investasi daerah. Namun, sejak diluncurkan beberapa tahun lalu program ini berhasil memberikan kepastian dalam penerbitan perizinan serta pengelolaan potensi investasi yang lebih teratur dan terarah. Dengan adanya program ini juga memberikan informasi tentang potensi investasi bagi calon investor yang sebelumnya sangat minim, nilai investasi tahunan yang relatif statis dengan dominasi investasi skala kecil sekarang telah mengalami peningkatan seperti tersedianya peta potensi investasi yang lebih terstruktur dan mudah diakses di internet serta masuknya investasi skala menengah dan besar.

## **3. Kesesuaian Karakter Kebijakan dan Lembaga yang Berwenang**

Dalam kebijakan publik, karakteristik harus menjadi pedoman dalam mengambil suatu kebijakan. Kebijakan adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk kepentingan-kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah (Nugroho, 2014).

Untuk mengetahui pengaruh dari sebelum dan sesudah adanya program ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Ekonomi dan Produksi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buru, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru serta Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa program ini memiliki karakteristik yaitu memberikan fasilitas dan juga kemudahan bagi para penanam modal, serta mengembangkan infrastruktur yang memadai. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan yang secara formal sesuai dengan karakter kebijakan pengembangan iklim investasi berdasarkan peraturan daerah dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru sebagai fasilitator dalam kegiatan penanaman modal sesuai dengan karakter program ini yaitu mampu memberikan kemudahan bagi para calon investor nantinya.

### **3.2. Tepat Pelaksana**

Dimensi tepat pelaksana memiliki arti bahwa suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya keterlibatan aktor. Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, tetapi ada aktor lain yaitu masyarakat dan swasta. Kebijakan akan efektif bila aktor implementasi sesuai dengan karakter kebijakan (Nugroho, 2014).

#### **1. Pelaksana Kebijakan yang Terlibat**

Untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan atau program, tentu harus didukung oleh pelaksana kebijakan yang kompeten dan memiliki kapabilitas dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dalam suatu kebijakan atau program harus ada kejelasan mengenai siapa saja pelaksana dan penanggungjawab dari kebijakan yang dibuat sehingga proses implementasi lebih mudah dan terarah (Nugroho, 2014).

Untuk mengetahui pengaruh dari sebelum dan sesudah adanya program ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Ekonomi dan Produksi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buru, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru serta Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Program ini adalah program dari pusat yaitu Kementerian Investasi yang kemudian dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buru melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru dengan bekerjasama dengan beberapa dinas yang terkait yang ikut menyediakan data terkait potensi daerah seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketenagakerjaan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu juga ada kerja sama dengan para investor, serta masyarakat yang menjadi pelaku usaha UMKM. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pelaksana sekaligus pengawas jalannya program sedangkan dinas lainnya hanya membantu dalam memetakan potensi yang ada di Kabupaten Buru.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Buru ini dilaksanakan dan diawasi langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif pada saat turun di lapangan misalnya pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait UMKM dan potensi investasi kepada para investor dan masyarakat.

#### **2. Pelaksana Langsung terhadap Kebijakan**

Pelaksanaan suatu program atau kebijakan membutuhkan dukungan baik dari masyarakat maupun dukungan fasilitas sarana prasarana serta anggaran yang memadai. Apabila tidak ada dukungan yang cukup sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat menjadi kendala yang bisa menyebabkan tujuan dari suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik (Nugroho, 2014).

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Buru, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Ekonomi dan Produksi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buru, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini diantaranya yaitu kurangnya anggaran yang menjadi kendala utama sehingga membuat investor kurang berminat untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Buru, karena jika tidak ada anggaran bagaimana kegiatan bisa berjalan, bahkan sejak tahun 2022 pada bagian penanaman modal tidak kebagian anggaran dan untuk tahun 2025 ini ada alokasi anggaran sebesar 30 juta yang akan difokuskan untuk pembuatan peraturan daerah terkait pemberian insentif bagi para investor. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu minimnya informasi dan promosi potensi investasi daerah yang tersedia bagi calon investor, nilai investasi yang masih rendah dan sebagian besar didominasi oleh usaha mikro dan kecil yang belum terorganisir dengan baik, dan terkendala juga oleh minimnya SDM yang tersedia serta kurangnya infrastruktur pendukung investasi yang belum memadai terutama akses jalan, listrik, dan telekomunikasi di beberapa wilayah potensial.

Berkaitan dengan jumlah SDM yang tersedia, saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru memiliki jumlah pegawai sebanyak 19 orang pegawai dengan mayoritas pendidikan terakhirnya adalah S1, sedangkan untuk Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal terdapat 4 orang pegawai. Penjelasan tersebut didukung oleh data pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru berdasarkan kualifikasi pendidikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

**Tabel 4.2 Komposisi Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Buru**

| No.          | Unit Kerja  | SLTA     | D3       | S1        | S2       | S3       | Jumlah    |
|--------------|---|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1.           | Kepala Dinas  | -        | -        | 1         | -        | -        | 1         |
| 2.           | Sekretariat   | -        | -        | 5         | -        | -        | 5         |
| 3.           | Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal | -        | 1        | 3         | -        | -        | 4         |
| 4.           | Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan        | -        | 1        | 4         | -        | -        | 5         |
| 5.           | Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Pelaporan Layanan           | 2        | -        | 2         | -        | -        | 4         |
| <b>Total</b> |   | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>15</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>19</b> |

Sumber: LKIP DPMPTSP Kabupaten Buru, 2025

Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru sebanyak 4 orang pegawai dengan 75% oleh PNS di bidang ini memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1. Pihak dinas sebaiknya mampu merekrut lebih banyak pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi untuk memudahkan pelaksanaan program-program di bidang pengembangan dan promosi investasi

Berdasarkan hasil wawancara dan beberapa data sekunder tersebut, dapat diketahui bahwa keterbatasan anggaran merupakan kendala yang paling utama dalam pelaksanaan program ini. Kurangnya anggaran ini menyebabkan tidak berjalannya kegiatan dari program ini yaitu pemberian insentif bagi investor, selain itu kurangnya infrastruktur pendukung investasi, kurangnya SDM yang

memadai serta minimnya informasi dan promosi potensi daerah juga menjadi hambatan pelaksanaan program ini.

### **3.3. Tepat Target**

Menurut (Nugroho, 2014), dimensi tepat target dapat dilihat dari 3 hal yaitu apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih atau bertentangan dengan kebijakan lainnya, apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi, dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya

#### **1. Dampak yang Dirasakan Masyarakat**

Dalam menerapkan jalannya suatu kebijakan atau program perlu untuk memperhatikan dampaknya kepada masyarakat. Setiap program tentunya selalu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, namun dengan adanya perencanaan dan pelaksanaan yang baik dapat meminimalisir dampak negatif dari program tersebut (Nugroho, 2014).

Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Buru, peneliti kemudian mewawancarai 3 (tiga) orang warga yang kesehariannya bekerja sebagai pedagang sayur, penjual jajanan, dan penjual keripik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat belum merasakan dampak yang signifikan dari pelaksanaan program ini, bahkan ada yang belum pernah merasakan dampaknya secara langsung. Namun, tentunya mereka memiliki harapan yang baik dengan adanya program ini.

#### **2. Kurun Waktu Target Pencapaian Kebijakan**

Dalam pencapaian target kebijakan ini tentu perlu ada ukuran pencapaian target waktu, dimana arah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan penting dan mendesak perlu untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan (Nugroho, 2014).

Untuk mengetahui berapa lama target waktu yang dibutuhkan dari pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Buru, maka selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru serta Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program ini sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apalagi ini berhubungan dengan kegiatan penanaman modal atau investasi yang memiliki banyak manfaat, jadi tidak ada batas waktu yang ditetapkan karena memang ada banyak sekali potensi di Kabupaten Buru yang memang belum dikelola bahkan belum diketahui oleh masyarakat. Diketahui bahwa program ini sudah berjalan kurang lebih 8 tahun sejak tahun 2018 dan akan terus berjalan sebagaimana mestinya karena tujuan pembuatan program ini salah satunya adalah untuk meningkatkan investasi atau kegiatan penanaman modal di Kabupaten Buru. Selain itu, secara umum program ini dibuat untuk mengatasi tren investasi di Kabupaten Buru yang cenderung berubah secara drastis meskipun terdapat potensi yang besar.

### **3.4. Tepat Lingkungan**

Dalam dimensi tepat lingkungan, ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu lingkungan kebijakan (interaksi lembaga perumus dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain terkait) dan

lingkungan eksternal kebijakan (*public opinion*, interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat, dan individu yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan) (Nugroho, 2014).

## **1. Interaksi Perumus Kebijakan dengan Pelaksanaan Kebijakan**

Menurut (Nugroho, 2014), dalam proses perumusan kebijakan akan terjadi interaksi antara masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan daerah. Mekanisme antar aktor dalam perumusan kebijakan mempertemukan kepentingan masing-masing aktor, berlangsung sepanjang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Untuk mengetahui bagaimana interaksi perumus kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan, maka peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru serta Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa program ini melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru yang mengawasi jalannya kegiatan di bidang penanaman modal dan juga perizinan seperti penerbitan izin usaha, pemberian kemudahan dalam penanaman modal, memfasilitasi usaha UMKM untuk mendistribusikan dagangannya, dan pembuatan peta potensi investasi bersama dinas lainnya yang memiliki data terkait peluang investasi di Kabupaten Buru. Selain itu juga melaksanakan pengawasan langsung di lapangan terkait kegiatan investasi yang masuk kedalam urusan pemerintah provinsi dan pusat.

## **2. Persepsi Publik akan Kebijakan**

Suatu kebijakan publik dibuat sehingga dapat dilihat nilai dan manfaat dari penerapannya (Nugroho, 2014). Setiap pihak baik masyarakat, investor, swasta, dan pihak-pihak lain diluar pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentunya memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat suatu kebijakan yang ditetapkan.

Untuk mengetahui pandangan masyarakat termasuk para investor dari pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Buru, maka peneliti melakukan wawancara bersama 3 (tiga) investor yang terdiri dari pemilik optik kacamata, pemilik toko bangunan, dan pegawai di PT. Gheothermal. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang masyarakat yang bekerja sebagai pedagang sayur, penjual jajanan, dan penjual keripik. Untuk mengetahui pandangan secara akademis, maka peneliti juga melakukan wawancara bersama 3 (tiga) orang akademisi yaitu dosen ekonomi pembangunan yang memiliki pengetahuan terkait dengan pengembangan investasi atau kegiatan penanaman modal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa investor yang ada, semua investor memiliki pandangan yang positif terkait program ini, karena program ini bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi daerah sehingga dengan adanya kemudahan yang diberikan, para investor dapat dengan mudah menanamkan serta mengembangkan usahanya sehingga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan beberapa masyarakat menunjukkan bahwa semua masyarakat memiliki harapan yang baik dengan adanya program ini karena dapat lebih mengembangkan usaha baik usaha kecil, sedang, maupun usaha-usaha besar, selain itu masyarakat juga merasa dipermudah karena pemerintah turut membantu untuk menjual barang dagangan di toko-toko swalayan besar, sehingga prosesnya pun menjadi lebih mudah atau dengan kata lain menjadi fasilitator. Masyarakat juga menganggap bahwa program seperti ini memang sangat diperlukan, apalagi mengingat saat ini kehidupan menjadi lebih sulit sehingga perlu untuk membuat usaha sendiri.

Jika dilihat secara akademis, jawaban dari beberapa akademisi tersebut menyatakan bahwa saat ini memang sangat diperlukan program-program terkait investasi karena program ini dapat menjadi instrumen strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di wilayah Kabupaten Buru, dimana peningkatan investasi menjadi pendorong utama perluasan kapasitas produksi daerah, apalagi Kabupaten Buru dengan potensi sumber daya alamnya yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan maka tentunya perlu didukung oleh aliran modal yang signifikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut. Disamping itu, apabila dilihat dari sisi transformasi struktural ekonomi, program investasi di Kabupaten Buru merupakan suatu upaya sistematis dalam mendiversifikasi basis ekonomi daerah. Dengan adanya program ini bisa menghadirkan kolaborasi antara pemerintah, sektor bisnis, dan institusi pendidikan sehingga dapat menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung terciptanya industri berbasis potensi lokal, karena daerah dengan iklim investasi yang kondusif cenderung mengalami pergeseran struktural ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Sedangkan, dari perspektif pembangunan berkelanjutan, program ini mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek penting dalam program ini adalah pengembangan kriteria investasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan kelestarian lingkungan. Dengan adanya program ini diharapkan bisa berpotensi menciptakan pemerataan manfaat pembangunan dan peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Buru secara komprehensif.

### **3.5. Tepat Proses**

Secara umum implementasi kebijakan publik terdiri dari 3 proses yaitu *Policy acceptance*, *Policy adoption*, dan *Strategic readiness*. Untuk tepat proses maka implementasi kebijakan harus mendapat dukungan secara politik, strategik, dan teknis (Nugroho, 2014).

#### **1. Pemahaman Masyarakat atas Kebijakan**

Pemahaman masyarakat adalah suatu hal yang penting dalam proses untuk mencapai tujuan suatu kebijakan (Nugroho, 2014). Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila masyarakat itu sendiri tidak memahami kebijakan yang akan dilaksanakan, oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti kebijakan atau program yang dimaksud, misalnya melalui kegiatan sosialisasi.

Untuk mengetahui apakah masyarakat mengetahui adanya Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Buru, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama 3 (tiga) investor yang terdiri dari pemilik optik kaca mata, pemilik toko bangunan, dan pegawai di PT. Gheothermal. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang masyarakat yang bekerja sebagai pedagang sayur, penjual jajanan, dan penjual keripik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa investor menunjukkan bahwa sebagai penanam modal mereka belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dari pemerintah sehingga mereka kurang paham akan adanya program tersebut, meskipun mereka sudah beberapa kali mengurus perizinan. Sedangkan menurut masyarakat, beberapa dari mereka sudah pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru, namun materi yang diberikan lebih berkaitan dengan UMKM.

#### **2. Proses Pelaksanaan Kebijakan**

Proses pelaksanaan kebijakan adalah tahap yang sangat penting dalam siklus kebijakan publik. Tahap ini merupakan proses mengubah rencana kebijakan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan adalah proses mentransformasikan keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai (Nugroho, 2014).

Proses pelaksanaan kebijakan merupakan jembatan antara formulasi kebijakan (apa yang direncanakan) dengan hasil kebijakan (apa yang dicapai).

Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Buru, peneliti melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru serta Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan kebijakan ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan seharusnya ada 2 yaitu, kegiatan pembuatan peta potensi investasi dan kegiatan pemberian insentif bagi para investor, namun karena ada keterbatasan anggaran sehingga hanya kegiatan pembuatan peta potensi investasi yang dapat dilaksanakan. Namun, disamping kedua kegiatan tersebut ada juga kegiatan lainnya yang dilakukan yaitu kerja sama dengan para pelaku usaha UMKM dalam hal ini memfasilitasi untuk menjual dagangannya di swalayan-swalayan besar yang ada

### **3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, Efektivitas Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Buru Provinsi Maluku belum sepenuhnya optimal. Meskipun kebijakan ini sudah berjalan beberapa tahun lalu, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi Efektivitas Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa indikator yang dinilai dalam tolak ukur teori efektivitas kebijakan menurut (Nugroho, 2014) yang belum berjalan dengan maksimal, seperti kurangnya anggaran yang menjadi kendala utama, minimnya informasi dan promosi potensi investasi daerah yang tersedia bagi calon investor, nilai investasi yang masih rendah dan sebagian besar didominasi oleh usaha mikro dan kecil yang belum terorganisir dengan baik, dan terkendala juga oleh minimnya SDM yang tersedia serta kurangnya infrastruktur pendukung investasi yang belum memadai terutama akses jalan, listrik, dan telekomunikasi di beberapa wilayah potensial.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bakri et al., 2022) yang membahas mengenai strategi untuk meningkatkan investasi di Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga mengemukakan bahwa faktor penghambat dalam menarik minat investasi adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai, kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah serta kurangnya data mengenai potensi investasi. Selain itu juga terdapat faktor yang mendukung peningkatan realisasi investasi yaitu dengan memanfaatkan seluruh bidang yang ada termasuk bidang perizinan untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui investasi memiliki pengaruh yang besar dalam pertumbuhan ekonomi karena pengaruhnya bagi masyarakat dan juga daerah, selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam rangka peningkatan investasi di Kabupaten Buru sangat didukung oleh kerja sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dinas-dinas lain, swasta, masyarakat termasuk investor itu sendiri. Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Zulkifly, 2023) yang menganalisis keberhasilan *collaborative governance* dalam pelaksanaan program investasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dimana pelaksanaan interaksi antar pemangku kepentingan secara rutin dilakukan pada rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan penanaman modal, rapat monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Mengenai pengaruh investasi juga diperkuat oleh

penelitian yang dilakukan oleh (Adnyani & Azansyah, 2024) yang menunjukkan bahwa investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan.

Selain itu, temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Saragi & Angelia, 2023) yang menganalisis mengenai strategi atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan investasi di Sumatera Utara adalah dengan meningkatkan kualitas investasi dengan melakukan inovasi pelayanan public seperti *North Sumatera Invest (NSI)*, dan meningkatkan efektifitas peluang investasi. Temuan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang menyatakan bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menarik minat investasi di Kabupaten, yaitu melalui inovasi pelayanan publik DUDESO (Depot UMKM dan Kerajinan Masyarakat Bupolo) dan meningkatkan peluang investasi dengan melakukan sosialisasi secara langsung dan promosi melalui sosial media.

Berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Lubis et al., 2023) yang mengkaji mengenai pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dalam menarik minat investasi di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa hal utama untuk menarik minat investor agar menanamkan modalnya adalah dengan memberikan citra yang positif dengan cara menghilangkan citra negatif tentang buruknya pelayanan perizinan, karena dengan menciptakan citra yang positif maka akan memberikan nilai tambah tersendiri. Sedangkan, temuan pada penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa anggaran merupakan hal utama dalam upaya untuk menarik investasi, karena dengan anggaran yang memadai maka semua kegiatan dalam program tersebut dapat berjalan dengan baik, salah satunya yaitu pemberian insentif/kemudahan bagi investor.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait Efektivitas Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam Rangka Peningkatan Investasi di Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Efektivitas Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Buru Provinsi Maluku kurang efektif, hal ini berdasarkan masing-masing dimensi berikut:
  - a. Berdasarkan dimensi tepat kebijakan, program ini sudah efektif karena pada indikator kesesuaian antara pelaksana kebijakan dengan tujuan kebijakan menunjukkan bahwa program ini telah memberikan pengaruh positif dalam hal ini terdapat peningkatan nilai realisasi investasi meskipun ada juga penurunan; pada indikator pengaruh kebijakan terhadap permasalahan terjadi setelah adanya program ini seperti masuknya investor skala menengah-besar, tersedianya *database* potensi investasi, dan peningkatan promosi potensi investasi; serta pada indikator kesesuaian karakter kebijakan dan lembaga yang berwenang sudah menunjukkan kesesuaian antara karakter Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru sebagai lembaga yang berwenang.
  - b. Dari dimensi tepat pelaksana, program ini kurang efektif karena meskipun pada indikator pelaksana kebijakan yang terlibat telah menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program ini sudah melibatkan para investor, masyarakat, dan dinas-dinas lainnya ternyata pada indikator pelaksanaan langsung terhadap kebijakan masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur pendukung investasi yang memadai, minimnya informasi dan promosi potensi investasi daerah, serta minimnya SDM yang tersedia.
  - c. Pada dimensi tepat target, program ini kurang efektif karena jika dilihat dari indikator dampak yang dirasakan masyarakat menunjukkan bahwa ternyata masih ada yang masyarakat yang belum merasakan dampak positif dari program ini bahkan ada yang belum

mengetahui tentang program ini, terutama masyarakat biasa seperti pedagang; sedangkan dari indikator kurun waktu target pencapaian kebijakan, program ini masih dilaksanakan dan tidak memiliki batasan waktu dalam pelaksanaannya.

- d. Dilihat dari dimensi tepat lingkungan, program ini sudah efektif karena apabila dilihat dari indikator interaksi perumus kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan telah melibatkan dinas-dinas yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsinya masing; sedangkan apabila ditinjau dari indikator persepsi publik akan kebijakan menunjukkan bahwa baik dari kalangan investor, masyarakat, maupun akademisi memiliki pandangan yang positif mengenai program ini.
  - e. Terakhir adalah dimensi tepat proses, program ini kurang efektif karena pada indikator pemahaman masyarakat atas kebijakan masih banyak masyarakat dan investor yang belum memiliki pemahaman akan program ini karena belum adanya sosialisasi yang menyeluruh; sedangkan dari indikator proses pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa dari 2 kegiatan yang harusnya dilaksanakan, hanya satu yang berjalan yaitu pembuatan peta potensi investasi, sedangkan kegiatan pemberian insentif belum dilaksanakan.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Buru Provinsi Maluku yaitu:
- a. Melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan perizinan melalui inovasi DUDESO (Depot UMKM dan Kerajinan Masyarakat Bupolo)
  - b. Mengikuti kegiatan-kegiatan pameran, salah satunya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten melalui Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) ikut berpartisipasi dalam pameran Inacraft 2024 di Jakarta
  - c. Melakukan kerja sama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta, misalnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Buru dalam pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) secara gratis di desa-desa yang memiliki jarak tempuh yang jauh dari Ibu kota kabupaten.

**Keterbatasan Penelitian,** Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis yang hanya difokuskan pada Efektivitas Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru, serta keterbatasan dalam kemampuan perolehan data yang hanya dilakukan pada instansi vital kebijakan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru dan tidak menyeluruh karena keterbatasan waktu dan lokasi geografis ketika dilakukannya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian,** Peneliti menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal, oleh karena itu disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan di kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku maupun provinsi lain dengan fokus yang sama, sehingga dapat menjadi perbandingan sejauh mana Efektivitas Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang dilakukan di berbagai konteks pemerintahan daerah.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, I. G. A. S., & Azansyah. (2024). The Influence Of Investment On Economic Growth In Sumbagsel. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 559–568. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1>
- Anjani, T., Sampara, L., & Rowa, H. (2019). Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. *Jurnal Visioner*, 11(3), 245–254.
- Bakri, R. M. S., Haliah, Nirwana, & Oemar, Muh. A. F. I. (2022). Perencanaan Strategis dalam Meningkatkan Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.37531/amar.v2i2.147>
- BKPM. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2021*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Sixth Edition)*. SAGE Publications, Inc.
- Dai, X., Rao, F., Liu, Z., Mohsin, M., & Taghizadeh-Hesary, F. (2023). Role of public and private investments for green economic recovery in the post-COVID-19. *Economic Research-Ekonomika Istrazivanja*, 36(1), 1146–1166. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2081865>
- Dewi, R. P., Rowa, H., & Dione, F. (2025). Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *JKP) Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 94–105.
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Public Policy by William Dunn: Analysis and Implementation. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9. <https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/index>
- Fuad, M., Sukarno, E., Sugiarto, Christina, M. E., & M. Fatima R.N Hannah. (2020). *Anggaran Perusahaan: Konsep dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kemenko Bidang Perekonomian. (2022, March 17). *Investasi Berkelanjutan Menjadi Sarana yang Signifikan untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi Serta Mendukung Pencapaian Target SDGs*. Ekon.Go.Id. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3936/investasi-berkelanjutan-menjadi-sarana-yang-signifikan-untuk-mendorong-pemulihan-ekonomi-serta-mendukung-pencapaian-target-sdgs>
- Lubis, A. K., Revida, E., & Humaizi, H. (2023). The Implementation of One-Stop Integrated Services in Attracting Investment to North Sumatera Province. *Dinasti International Journal of Economics, Finance, and Accounting*, Vol. 4, 41–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/dijefa.v4i1>
- Martua, A. (2022). Dampak Investasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (Sunter dan Bantargebang) terhadap Perekonomian Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Inovasi Aparatur*, 4(2), 419–431.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook (Third Edition)*. SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Nugrahayu, H., Wasistiono, S., Rowa, H., & Lukman, S. (2022). Bureaucracy Reform through Transformation of Public Services at the Department of Investment and One Door Integrated Services (Case Study in the City of Palangka Raya, Gunung Mas Regency and Central Kalimantan Province). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 7478–7487. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4484>
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. PT. Elex Media Komputindo.

- Padhan, R., & Prabheesh, K. P. (2021). The economics of COVID-19 pandemic: A survey. *Economic Analysis and Policy*, 70, 220–237. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.02.012>
- Putra, B. P., & Nababan, A. M. (2019). Optimalisasi Investasi untuk Negara Anggota APEC (Kajian Ekonomi & Tantangan DPMPTSP-DKI Jakarta). *Jurnal Inovasi Aparatur*, 1(2), 73–83. [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)
- Putri, A. S. (2022, January 31). *Potensi Sumber Daya Alam Indonesia*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/28/110000269/potensi-sumber-daya-alam-indonesia>
- Saragi, S., & Angelia, N. (2023). Strategy of the Investment and Licensing Services in Increasing Investment in North Sumatra Province During the Covid-19 Pandemic. In *Proceedings of the 4th International Conference on Social and Political Development*, 138–143. <https://doi.org/10.5220/0011560400003460>
- Sugiarto, E. C. (2019, August 2). *Investasi dan Indonesia Maju*. Setneg.Go.Id. [https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi\\_dan\\_indonesia\\_maju](https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju)
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(1), 29–50.
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. L. (2016). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource (Fourth Edition)*. John Wiley & Sons, Inc.
- Wang, Y., Wang, X., Zhang, Z., Cui, Z., & Zhang, Y. (2023). Role of fiscal and monetary policies for economic recovery in China. *Economic Analysis and Policy*, 77, 51–63. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.10.011>
- Yanto. (2024, February 29). *Rendahnya Realisasi Investasi di Bangka Belitung 2023*. Dpmptsp.Babelprov.Go.Id. <https://dpmptsp.babelprov.go.id/content/rendahnya-realisisasi-investasi-di-bangka-belitung-2023>
- Yanto, edi, Nurfitriana, & Ijma. (2022). *Konsep Dasar Penganggaran Perusahaan*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Zulkifly, A. (2023, October 2). Collaborative Governance in Investment Programs in Makassar City. *KnE Social Sciences 1st Doctoral International Conference 2023*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14110>